



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 45 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Inspektorat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Inspektorat Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Inspektorat tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Inspektorat Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Inspektorat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Inspektorat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Inspektorat Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**

**TAHUN 2022 NOMOR 45**





merupakan implementasi atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), yang kemudian tata cara penyusunan dan sistemika penulisan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Garut menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan pagu dana indikatif serta sumber dananya.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

- dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
  29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
  30. Peraturan Bupati Garut Nomor 245 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
  31. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari capaian indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan yang

telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2023.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi misi jangka menengah daerah Kabupaten Garut.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penyusunan RENJA Inspektorat Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Garut agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu, dan realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan



6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Kabupaten Garut;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Ulasan atas hasil review dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru

yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023.

#### BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

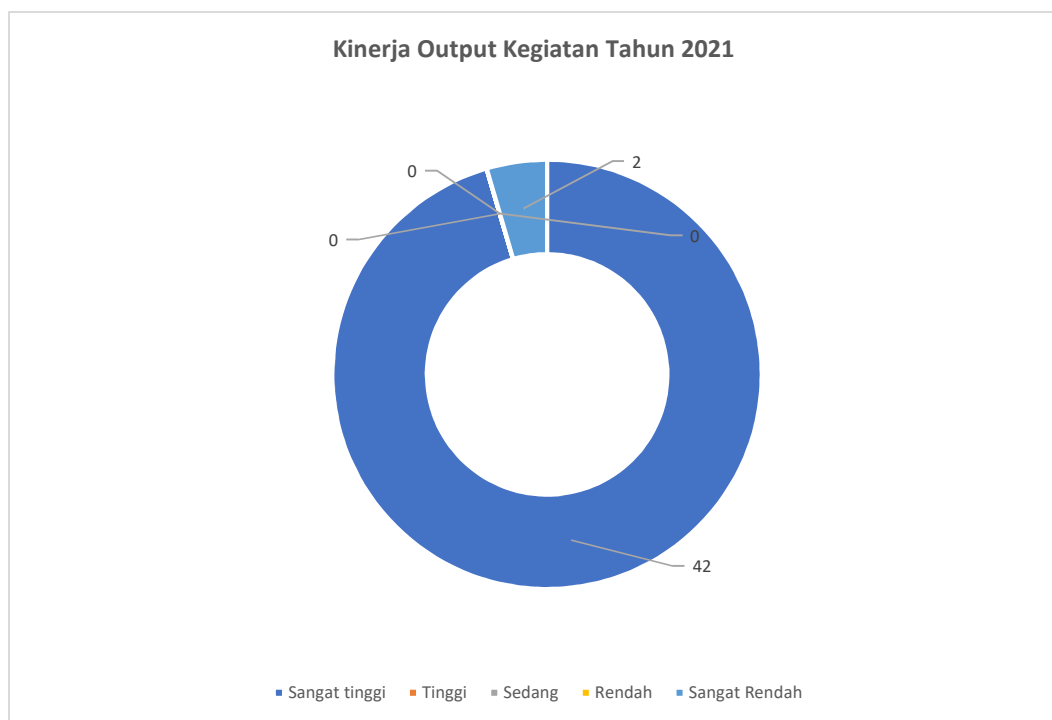
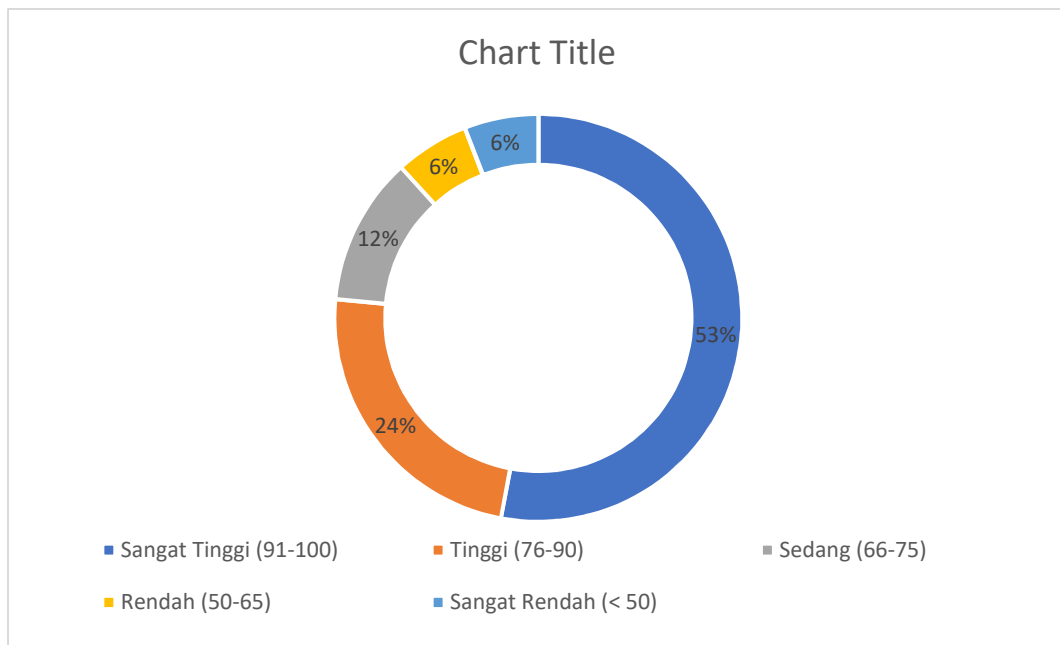
Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

### **2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

1. Rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 memuat 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 30.696.804.161,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.529.300.922,00. Untuk menilai capaian kinerja keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi “sangat tinggi” yaitu capaian berkisar antara 91 – 100 %, “Tinggi” capaian berkisar antara 76 - 90%, “sedang” capaian berkisar antara 66 – 75 %, “rendah” berkisar antar 50 -65%, dan “sangat rendah” dengan capaian di bawah 50%.
2. Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021, terdapat 18 sub kegiatan dengan status capaian “Sangat Tinggi” (52,94%), 8 sub kegiatan dengan status capaian “Tinggi” (23,52%), 4 kegiatan kegiatan dengan status capaian “Sedang” (11,76%), 2 kegiatan dengan status capaian “Rendah” (5,88%), dan 2 kegiatan dengan status “Sangat Rendah” (5,88%).
3. Pencapaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2021 dengan status “Rendah” yaitu terdapat pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja. Rendahnya realisasi anggaran pada sub kegiatan tersebut disebabkan adanya penyesuaian penugasan dengan kondisi sumber daya aparatur yang ada, yang harus menyesuaikan dengan penugasan kegiatan lain. Selanjutnya untuk status “Sangat Rendah”, terdapat pada sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Realisasi anggaran pada sub kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah sangat rendah mengingat terdapat perubahan rencana penugasan yang sedianya telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2021 dilaksanakan secara sampling dari seluruh perangkat daerah yang direncanakan sebelumnya seperti Reviu RKA, Reviu Renja Perubahan, dan Reviu Renja 2022, sehingga hal ini berdampak pada realisasi keuangan yang tidak tercapai 100%. Begitu pula untuk sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional dan

lapangan, tidak dapat direalisasikan sehubungan dengan proses tender pengadaan kendaraan yang dilaksanakan oleh UKPBJ mengalami kegagalan (Gagal Lelang), dimana samapai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada penyedia yang menyampaikan penawaran pengadaan kendaraan tersebut.

Gambar 2.1



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021**

*(Dalam Rupiah)*

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN Setelah Perubahan	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>30.696.804.161</b>	<b>26.529.300.922</b>	<b>86.42%</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>30.696.804.161</b>	<b>26.529.300.922</b>	<b>86.42%</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>20.946.272.261</b>	<b>19.104.122.822</b>	<b>91.21%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.256.400	38.696.000	85,50%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.250.000	72.862.000	79.85%
3	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	15.681.908.261	15.372.424.376	98.03%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.910.000	17.910.000	100%
5	Pengamanan barang Milik Daerah	148.387.909	148.132.384	99.83%
6	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	172.911.000	170.495.800	98.60
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.297.750.000	829.878.000	63.95%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.277.000	7.277.000	100%
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	725.166.400	722.487.785	99.63%
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	94.067.700	92.945.500	98.81%
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	206.424.600	202.032.000	97.87%
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.493.600	10.293.500	98.09%
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	226.800.000	159.510.000	70.33%
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.260.000	213.266.850	70.32%
15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	806.040.000	0	0%
16	Pengadaan Mebel	260.621.600	259.865.472	99.71%
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	100%
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, & listrik	170.492.513	125.718.580	73.74%
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.815.000	61.816.000	93.92%
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.836.650	127.321.900	99.60%
21	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Operasional	105.700.000	92.184.549	87.21%
22	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	374.903.628	373.005.126	99.49%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>8.470.247.500</b>	<b>6.304.033.700</b>	<b>74.43%</b>
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.525.594.500	2.847.647.000	80.77%
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.938.110.000	705.383.250	36.40%
3	Reviu Laporan Kinerja	22.425.000	13.900.000	61.98%
4	Reviu Laporan Keuangan	210.975.000	180.547.450	85.58%
5	Pengawasan Desa	606.040.000	586.395.000	96.76%
6	Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	876.473.000	760.296.000	86.74%
7	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.290.630.000	1.209.865.000	93.74%
<b>III</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISITENSI</b>	<b>1.280.284.400</b>	<b>1.121.144.400</b>	<b>87.57%</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	282.554.300	252.604.300	89.40%

2	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	223.850.000	158.780.000	70.93%
3	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	87.350.000	83.500.000	95.59%
4	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	467.310.100	452.700.100	96.87%
5	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	219.220.000	173.560.000	79.17%

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah 2019-2024 telah ditetapkan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai. Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

- I. Meningkatnya kualitas pengawasan Inspektorat
  1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
  2. Persentase SKPD yang Nilai SAKIP nya minimal "BB"
  3. Persentase pengaduan yang tertangani
- II. Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
  1. Persentase jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP
- III. Meningkatnya penerapan sistem integritas
  1. Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi
- IV. Meningkatnya kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP)
  1. Level Kapabilitas APIP

Keberhasilan capain kinerja tahun 2021 di dukung oleh sejumlah program prioritas sebagai berikut sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2. Program Penegakan Integritas
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi



Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Garut pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 74,63%;

KATEGORI	Jumlah Tindak Lanjut	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Sifatse Tindak Lanjut
KORUPSI PERANGKAP DAERAH	140	150	150
KECAMATAN	40	270	40
LAIN	20	30	30
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>550</b>	<b>220</b>
<b>PERSENTASE</b>			<b>74,63%</b>

2. Persentase SKPD yang Nilai SAKIP nya minimal “BB” sebesar 44,00%;
3. Persentase pengaduan yang tertangani sebesar 100%;
4. Persentase jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP sebesar 0%;
5. Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi sebesar 85,00%;
6. Level Kapabilitas APIP mencapai Level 3.

Dari 4 sasaran dan 6 indikator kinerja utama tersebut bahwa Persentase SKPD yang Nilai SAKIP nya minimal “BB” hasil evaluasi AKIP Tahun 2020 untuk tahun evaluasi 2021 mengalami penurunan sebesar 1,33% dari 45,33% menjadi 44,00% pada tahun 2021. Untuk Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi hasil penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dimana naik 7,96% yaitu dari 77,04%, menjadi 85,00%. Dan untuk capaian Persentase jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP sebesar 0%, dikarenakan tidak dilakukan evaluasi sehubungan dengan adanya perubahan regulasi penilaian yang diatur oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

**Tabel 2.2**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan) Kabupaten Garut**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>4.01.001</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>98,04%</b>	<b>100 %</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>			
4.01.001.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat masuk dan keluar	6000 buah	-	1200 buah	1200 buah	100%			
4.01.001.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	4 Jenis	12 Bulan	4 Jenis	4 Jenis	100%			
4.01.001.0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Surat Ijin Kendaraan Dinas/Operasional	110 STNK	10 Mobil dan 12 Motor	22 STNK	22 STNK	100%			
4.01.001.0008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	20 Orang	12 Bulan	4 Orang	4 Orang	100%			
4.01.001.0009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	3 Jenis dan 260 Buah Jenis/Buah	3 Jenis	3 Jenis dan 52 Buah	3 Jenis dan 52 Buah	100%			
4.01.001.0010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	55 Jenis	59 Jenis	55 Jenis	55 Jenis	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.001.0011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis Cetak, 1505000 Lembar Coy dan 1250 Jilid Cover	Cetak 7 Jenis, Penggandaan 325.311 Lembar	7 Jenis Cetak, 375000 Lembar Copy dan 500 Jilid Cover	7 Jenis Cetak, 337500 Lembar Copy dan 470 Jilid Cover	95%			
4.01.001.0012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis 664 Buah)	6 Jenis 125 buah	8 Jenis (132 Buah)	8 Jenis (132 Buah)	100%			
4.01.001.0013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	19 Jenis	11 Jenis	26 Jenis	26 Jenis	100%			
4.01.001.0014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	4 Jenis	4 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	100%			
4.01.001.0015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	3 Jenis	360 Eksemplar	3 Jenis	3 Jenis	100%			
4.01.001.0017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	27750 Per Orang	2950 Orang	5550 Per Orang	5550 Per Orang	100%			
4.01.001.0033	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah Penyediaan Jasa Keamanan	30 Orang	-	6 Orang	6 Orang	100%			
4.01.001.0092	Rapat-rapat Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah fasilitasi perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1468 OH	12 Bulan	150 OH	128 OH	21%			
4.01.001.0094	Rapat-rapat Pembinaan Ke Dalam Daerah	Jumlah fasilitasi perjalanan dinas rapat-rapat dan pembinaan ke dalam daerah	1168 OH	12 Bulan	368 OH	137 OH	12%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>4.01.002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik</b>	<b>100 %</b>	<b>98,80%</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
4.01.002.0003	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2	7 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2	1 unit	7 Unit Roda 4 dan 4 Unit Roda 2	7 Unit Roda 4 dan 4 Unit Roda 2	100%			
4.01.002.0010	Pengadaan Meubeulair	Jumlah Mebeleur	3 Jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	100%			
4.01.002.0024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	148 Unit	10 unit dan 12 unit	10 Unit R4 dan 10 Unit R2 Unit Roda 4 dan Unit Roda 2	10 Unit R4 dan 10 Unit R2 Unit Roda 4 dan Unit Roda 2	100%			
4.01.002.0042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 Gedung	1 Gedung	5 Ruangan	5 Ruangan	100%			
4.01.002.0068	Penataan Ruang Gedung Kantor	Jumlah penataan ruang gedung kantor	29 Ruangan	4 Ruang	7 Ruangan	7 Ruangan	100%			
4.01.002.0180	DED Gedung Kantor	Jumlah dokumen DED	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
<b>4.01.005</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Tingkat Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
4.01.005.0098	Pengadaan Pakaian Batik	Jumlah Pakaian Batik	880 Buah		330 Stel	330 Stel	100%			
4.01.005.0099	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pakaian Olahraga	220 Buah		200 Stel	200 Stel	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>4.01.006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>	<b>95%</b>	-	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
4.01.006.0001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	30 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%			
4.01.006.0004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
4.01.006.0010	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Jumlah Dokumen Renja	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
4.01.006.0043	Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei	20 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100%			
<b>4.01.021</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Persentase pemenuhan Infrastruktur kebijakan peningkatan kapabilitas APIP</b>	<b>3 Level</b>	<b>78,74%</b>	<b>3 Level</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
4.01.021.0001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Pelatihan yang Dilaksanakan	42 Kali	-	2 Kali	2 Kali	100%			
4.01.021.0002	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Pelatihan yang Diikuti	33 Jenis Diklat	-	1 Jenis Diklat	1 Jenis Diklat	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.066	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	95%	82,96%	75%	78,83%	105,11%			
		Persentase SKPD yang nilai SAKIP-nya minimal BB	95%	70%	75%	45,33%	60,44%			
		Persentase Pengaduan yang tertangani lingkup Irban I, II, III dan IV	100%	100%	100%	100%	100%			
		Persentase jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP	100%	58,68%	50%	0%	0%			
4.01.066.0001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (DID)	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	2.495 LHP	166 Dokumen	499 LHP	474 LHP	95%			
4.01.066.0002	Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Berita Acara Tindak Lanjut	2.495 BAT	475 Dokumen	499 BAT	499 BAT	100%			
4.01.066.0003	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	3 Jenis Dokumen		6 Jenis Dokumen	6 Jenis Dokumen	100%			
4.01.066.0004	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Kabupaten	Jumlah Rakor Pengawasan yang Dilaksanakan dan Diikuti	15 Kali	1 Dokumen	1 Kali	1 Kali	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.066.0005	Pelaksanaan Pengawasan Prioritas Nasional (DID)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Prioritas Nasional	3 Jenis Dokumen	-	3 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	67%			
4.01.066.0009	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKIP PEMDA) dan Evaluasi SAKIP	Jumlah Laporan Hasil Reviu	451 LHR	77 Dokumen	151 LHR	151 LHR	100%			
4.01.066.0010	Reviu Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu	4 Jenis LHR	5 Dokumen	4 Jenis LHR	4 Jenis LHR	100%			
4.01.066.0011	Reviu Dokumen Perencanaan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu	375 LHR	-	75 LHR	75 LHR	100%			
4.01.066.0015	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengaduan yang Dilayani	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	67%			
4.01.066.0016	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP	Jumlah SKPD melaksanakan SPIP	Jumlah SKPD melaksanakan SPIP	77 Dokumen	38 Unit Kerja	-	0%			
<b>4.01.067</b>	<b>Program Penegakan Integritas</b>	<b>Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi</b>	<b>87%</b>	<b>43,12%</b>	<b>84%</b>	<b>77,04%</b>	<b>91,71%</b>			
4.01.067.0001	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Jumlah Kegiatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	20 Kegiatan	4 Dokumen	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.067.0002	Survey Penilaian Integritas	Jumlah Survei Penilaian Integritas	5 Kali	1 Kali	1 Kali	-	0%			
4.01.067.0003	Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah SKPD yang Difasilitasi dalam Pemenuhan ZI WBK dan WBBM	375 SKPD/Instansi	14 Unit Kerja	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	100%			
4.01.067.0004	Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar	Jumlah Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar	10 Kegiatan	4 Dokumen	2 jenis	2 jenis	100%			
<b>4.01.068</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Persentase pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
4.01.068.0001	Pembuatan SIMWASDA, SIPTL dan Sistem Informasi lainnya Pendukung Pengawasan	Jumlah Sistem Informasi yang Dibuat	10 Aplikasi	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%			
<b>Mengikuti Permendagri No. 90 Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran 2021 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021</b>										
<b>6.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)</b>						<b>70%</b>	<b>52%</b>	<b>74,29%</b>
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)</b>						<b>6 Jenis</b>	<b>6 Jenis</b>	<b>50,00%</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						75 Laporan	-	0,00%
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						2 Jenis	1 Jenis	50,00%
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja						1 Laporan	1 Laporan	100,00%
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan						2 Jenis	2 Jenis	100,00%
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa						421 LHP	98 LHP	23,28%
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						499 BAT	74 BAT	14,83%
<b>6.01.02.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irbn I, II, III, IV, dan Irbn Investigasi dan Pengaduan)</b>						<b>8 Jenis</b>		<b>13%</b>
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						8 Jenis	1 Jenis	13%
<b>6.01.03</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan</b>						<b>85%</b>	-	<b>21%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>6.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan</b>						<b>3 Laporan</b>	-	<b>0%</b>
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun						3 Laporan	-	0%
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>						<b>4 Kegiatan</b>	-	<b>50%</b>
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah						2 Jenis	-	0%
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						1 Dokumen	-	0%
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						2 Jenis	-	0%
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi						3 Jenis	1 Jenis	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penegakan Integritas								
<b>6.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>					<b>Level 3</b>	-	<b>0%</b>	
<b>6.01.01.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>					<b>19 Dokumen</b>	-	<b>0%</b>	
6.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8 Dokumen	1 Dokumen	13%	
6.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Dokumen	-	0%	
<b>6.01.01.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>					<b>95 Orang</b>	-	<b>30%</b>	
6.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					95 Orang	95 Orang	30%	
6.01.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD					1 Dokumen	-	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan						6 Orang	-	0%
6.01.01.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						6 Orang	-	0%
6.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan						2 Jenis	-	30%
6.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						110 Buah	-	17%
6.01.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						10 Orang	-	0%
6.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan						7 Jenis	7 Jenis	0%
6.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						7 Jenis	2 Jenis	28,57%
6.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						59 Jenis	26 Jenis	44,07%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						7 Jenis	7 Jenis	100,00%
6.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						7 Jenis	1 Jenis	14,29%
6.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						3 Jenis	3 Jenis	25,00%
6.01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.600 Orang	1.946 orang	18,36%
6.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300 OH	38 OH	12,67%
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
<b>6.01.01.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>						-	-	
6.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						-	-	
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra sampai Akhir Periode) Tahun 2024 Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>6.01.01.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>						<b>4 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>100%</b>
6.01.01.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1200 Buah	300 Buah	25,00%
6.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4 Jenis	4 Jenis	25,00%
6.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						36 Unit	4 Unit	11,11%
6.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						3 Orang	-	0,00%
<b>6.01.01.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>						<b>3 Jenis</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>50%</b>
6.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya						38 Unit	7 Unit	18,42%

## **ii. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Dari tabel 2.2 di atas diketahui bahwa terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang telah mencapai target akhir Renstra, yaitu Persentase Pengaduan yang tertangani tepat mencapai 100% target akhir Renstra. 5 (lima) indikator kinerja lainnya, yaitu Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, Persentase SKPD yang nilai SAKIP nya minimal “BB”, Persentase jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Persentase MCP (Monitoring Center Prevention) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi, Level Kapabilitas APIP tidak mencapai target yang telah ditetapkan di akhir Renstra.

Dalam hal ini, untuk indikator kinerja yang telah mencapai target Renstra perlu untuk dipertahankan pencapaian kinerja tersebut dan untuk yang belum mencapai target akhir Renstra perlu dilakukan peningkatan kinerja pada Rencana Strategis di tahun mendatang.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pengawasan, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27), dan sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 79 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Maka dari itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah dituntut untuk selalu dinamis dengan mengadakan berbagai penyesuaian dan perubahan serta berorientasi pada pembaharuan terutama melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang tentunya ini menjadi tugas berat yang diemban oleh seorang pimpinan Inspektorat Daerah, dalam hal ini adalah Inspektur Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 245 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, Inspektur Daerah mempunyai tugas membina dan mengawasi



pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Adapun fungsi yang diemban oleh Inspektur Daerah, dalam mewujudkan tugas pokok tersebut Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi dibantu oleh unit kerja yang terlibat langsung di dalam pelaksanaan tugas pokok tujuan organisasi, antara lain :

- a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur yang mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;  
dan
- 3) Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

b. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan.

Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari :

- 1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- 2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- 5) Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektur Pembantu di bantu oleh kelompok Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD), dan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawain.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas

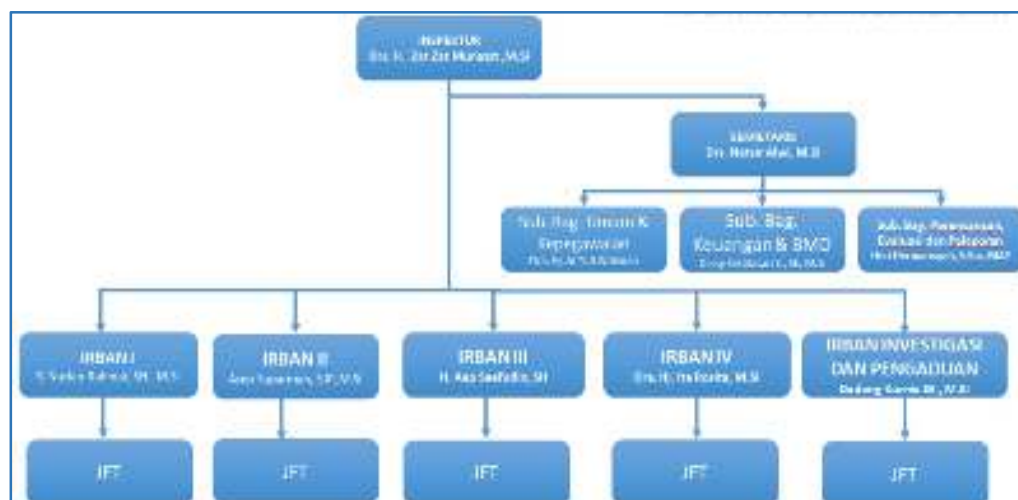
manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi.

Kelompok Jabatan Fungsional Jumlah jabatan fungsional ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya. Dan untuk jenjang dan jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 sebagai berikut :

Gambar 2.3

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Garut:



Berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, komposisi pegawai Inspektorat Daerah Garut per Desember 2021 :

### 1. Komposisi SDM Inspektorat

Sebaran sumber daya pegawai yang ada di unit kerja Inspektorat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

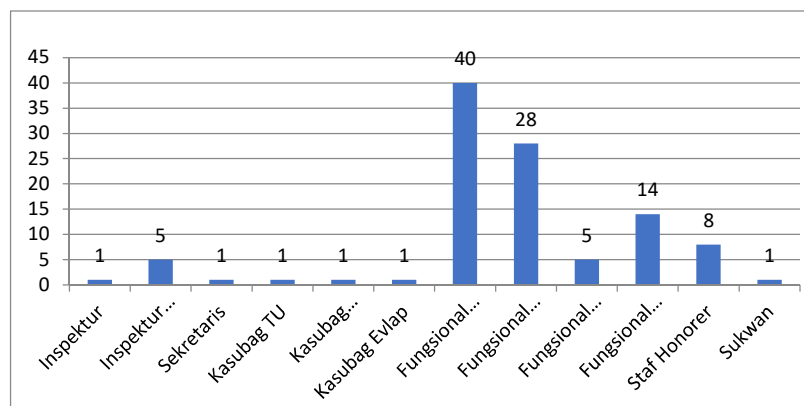
Tabel 2.3  
Komposisi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Garut

No.	Status	Jumlah (Orang)
1.	Jenjang Struktural	9
2.	Fungsional Auditor	40
3.	Fungsional P2UPD	28

4.	Fungsional Auditor Kepegawaian	5
5.	Fungsional Umum	14
6.	Staf Honorer	8
7.	Sukwan	1

## 2. Komposisi Jabatan Struktural Inspektorat

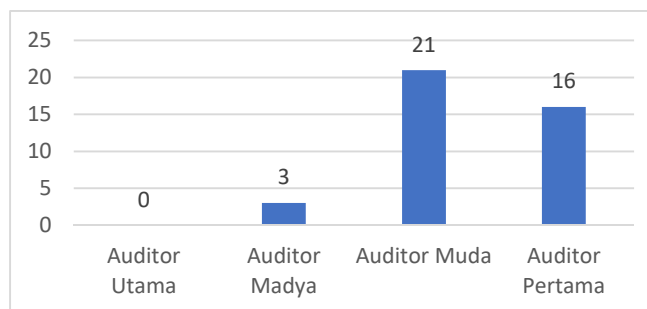
Gambar 2.4  
Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat



## 3. Jabatan Fungsional Auditor

Komposisi jabatan fungsional auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

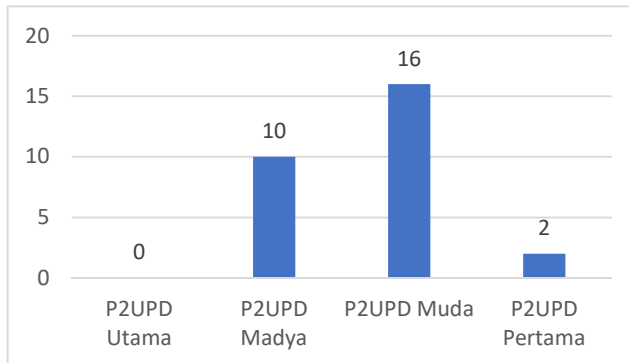
Gambar 2.5  
Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat



Berdasarkan gambaran kondisi pegawai Inspektorat di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi kekurangan untuk jabatan auditor pertama. Dengan demikian, dalam tim mandiri penugasan kepada ketua tim banyak diperankan sebagai anggota tim untuk memenuhi komposisi anggota dalam tim mandiri.

#### 4. Jabatan Fungsional P2UPD

Gambar 2.6  
Komposisi Jabatan Fungsional P2UPD Inspektorat

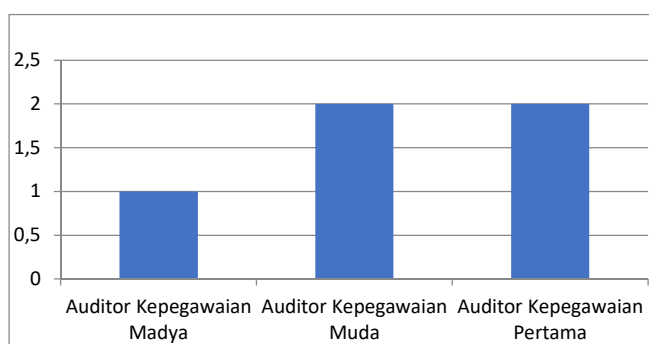


Berdasarkan gambaran kondisi pegawai Inspektorat di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi kekurangan untuk jabatan P2UPD pertama. Dengan demikian, dalam tim mandiri penugasan kepada ketua tim banyak diperankan sebagai anggota tim untuk memenuhi komposisi anggota dalam tim mandiri.

#### 5. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Komposisi jabatan fungsional auditor kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

Gambar 2.7  
Komposisi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Inspektorat

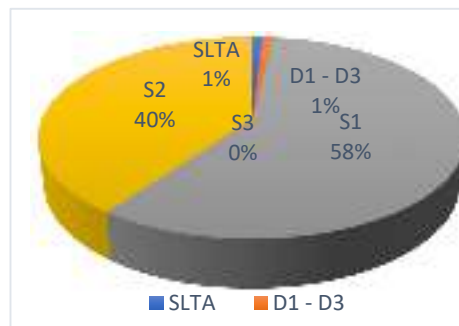


Berdasarkan gambaran kondisi pegawai Inspektorat di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi kekurangan untuk jabatan auditor kepegawaian pertama. Dengan demikian, dalam tim mandiri penugasan kepada ketua

tim banyak diperankan sebagai anggota tim untuk memenuhi komposisi anggota dalam tim mandiri.

## 6. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

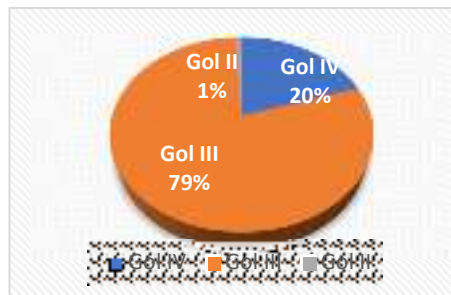
Gambar 2.8  
Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 40% telah menyelesaikan pendidikan S2, dan 58 % berpendidikan S1, 1% berpendidikan D3 dan 1% berpendidikan SLTA.

## 7. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Kepangkatan

Gambar 2.9  
Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang



Komposisi pegawai di Inspektorat berdasarkan golongan, sebanyak 20 orang (20%) berada pada golongan IV, 79 orang berada pada golongan III (79%) dan golongan II sebanyak 1 orang (1%).

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dapat dilihat dari pencapaian Indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Garut tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dikaitkan dengan target dalam Renstra Inspektorat Daerah.

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Garut**

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Inspektorat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Pengawasan		Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	
2	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik Sekali	Baik	Baik	Baik	Baik Sekali	



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pelaksanaan peran Inspektorat sebagai sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pengawasan internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal maupun eksternal lembaga, antara lain:

1. Belum optimalnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang disebabkan oleh belum profesionalnya aparatur pemerintahan daerah, aparat pengawasan, dukungan peraturan perundangan, serta kesadaran hukum masyarakat;
2. Belum sinerginya sistem pengawasan internal pemerintah yang menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pemeriksaan/pengawasan. Hal ini perlu adanya koordinasi diantara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
3. Masih terbatasnya tenaga yang professional dibidang pengawasan yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional Auditor, dimana masih adanya kesulitan dalam tingkat kelulusan yang masih tergantung dari rekomendasi dari BPKP serta Jabatan P2UPD;
4. Masih rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan perundangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga menyebabkan terjadinya temuan-temuan yang sifatnya berulang-ulang;
5. Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
6. Masih ada ASN yang mempunyai sikap Mental dan Budaya Korupsi serta upaya dan komitmen Pemerintah Daerah dan Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan KKN belum optimal;

7. Masih belum optimalnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah sehingga level maturitas SPIP masih pada tingkat berkembang;
8. Masih rendahnya tingkat efisiensi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
9. Masih terjadinya praktik-praktik pungli yang terjadi dalam pelayanan kepada masyarakat;
10. Tingginya jumlah pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah desa;
11. Belum memadainya Sarana dan Prasarana penunjang pengawasan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan peran APIP dalam memberikan peringatan dini (*early warning system*) melalui pengawasan dan *consulting partner*;
- b. Peningkatan Kapabilitas APIP;
- c. Peningkatan peran pengawasan APIP dalam mengawal implementasi SPIP;
- d. Mewujudkan implementasi SAKIP SKPD yang efisien;
- e. Optimalisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan mengintensifkan koordinasi kerjasama APIP dan APH;
- f. Optimalisasi fasilitasi Tim Saber Pungli Kabupaten;
- g. Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang pengawasan.
- h. Peningkatan efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

- i. Percepatan penanganan Pengaduan Masyarakat;
- j. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sub bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu: 1) membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2) penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan 3) penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

**Tabel 2.5**

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>UNSUR PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH</b>					<b>UNSUR PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH</b>					
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>36.620.202.100</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>36.620.202.100</b>	
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>161.501.600</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>161.501.600</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	57.650.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	57.650.800	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	103.850.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	103.850.800	-
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>21.359.579.707</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>21.359.579.707</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/Bulan	21.311.969.707	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/Bulan	21.311.969.707	-

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1 Laporan	47.610.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1 Laporan	47.610.000	-
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>185.239.886</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>185.239.886</b>	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	185.239.886	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	185.239.886	-
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>2.046.556.800</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>2.046.556.800</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	110 Paket	197.383.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	110 Paket	197.383.000	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	97 Orang	1.849.173.800	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	97 Orang	1.849.173.800	-
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>1.378.012.800</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>1.378.012.800</b>	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	15.446.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	15.446.700	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	439.336.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	439.336.000	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22.794.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22.794.300	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	228.887.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	228.887.400	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	29.305.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	29.305.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	261.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	261.250.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	354.340.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	354.340.000	-

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	26.653.400	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	26.653.400	-
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>11.091.200.257</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>11.091.200.257</b>	
	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	164.716.000	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	164.716.000	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	10.926.484.257	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	10.926.484.257	-
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>287.171.050</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>287.171.050</b>	
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	4 Laporan	10.088.800	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	4 Laporan	10.088.800	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	99.525.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	99.525.000	-

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	30.220.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	30.220.000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	147.337.250	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	147.337.250	-
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>110.940.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>110.940.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	43 Unit	110.940.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	43 Unit	110.940.000	-
<b>II</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>5.950.792.400</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>5.950.792.400</b>	
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>4.426.300.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>4.426.300.000</b>	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	75 Laporan	1.820.300.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	75 Laporan	1.820.300.000	-
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan	479.884.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan	479.884.000	-
	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	6.100.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	Reviu Laporan Kinerja	-
	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	66.550.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	66.550.000	-
	Pengawasan Desa	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	168 Laporan	1.331.410.000	Pengawasan Desa	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	168 Laporan	1.331.410.000	-
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	500 Dokumen	722.056.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	500 Dokumen	722.056.000	-
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>1.524.492.400</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>1.524.492.400</b>	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	1.524.492.400	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	1.524.492.400	-
<b>III</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>1.796.404.500</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>1.796.404.500</b>	
<b>1</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>537.520.500</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>537.520.500</b>	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3 Rekomendasi	537.520.500	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3 Rekomendasi	537.520.500	-
<b>2</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>1.258.884.000</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>1.258.884.000</b>	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Perangkat daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	75 Perangkat Daerah	109.312.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Perangkat daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	75 Perangkat Daerah	109.312.000	-

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Perangkat daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 Perangkat Daerah	81.250.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Perangkat daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 Perangkat Daerah	81.250.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	692.322.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	692.322.000	-
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 Perangkat Daerah	376.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 Perangkat Daerah	376.000.000	-
					<b>44.367.399.000</b>					<b>44.367.399.000</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Garut. Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5**

### **Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TIDAK ADA				

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan nasional pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun diatur dengan sebuah Peraturan Menteri dalam Negeri. Peraturan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah pada suatu tahun anggaran. Terakhir, kebijakan tentang pembinaan dan pengawasan adalah dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah serta kegiatan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Daerah Jenderal Kementerian/ Inspektorat Daerah Utama/Inspektorat Daerah Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Daerah Provinsi/Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, Inspektorat Kabupaten Garut, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Inspektorat adalah:

***“Meningkatnya Tata Kelola dan Profesionalisme Pengawasan Intern”***

Adapun keterkaitan tujuan Inspektorat dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2022, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra Inspektorat Daerah, dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari misi yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022.

Adapun sasaran dari tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Inspektorat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Profesionalisme Pengawasan Intern	1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan	Indeks Kepuasan Pengawasan	Baik
		2. Meningkatkan Profesionalisme Pengawasan	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Baik

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Peraturan Perundang-undangan tentang pemutakhirannya, serta penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai institusi yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Garut untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Garut berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	UNSUR PENGAWASAN								
6.01	INSPEKTORAT DAERAH								
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Kab. Garut	> 4 Indeks	36.620.202.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	34.936.930.000
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Kab. Garut	> 4 Indeks	161.501.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	140.630.000
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut	8 Dokumen	57.650.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	30.218.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	1 Laporan	103.850.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	110.412.000
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>21.359.579.707</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>18.505.420.000</b>
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut	97 Orang/Bulan	21.311.969.707	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	18.490.900.000
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	47.610.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	14.520.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.1.1.01.2.03	Administrasi barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Kab. Garut	> 4 Indeks	185.239.886	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	179.549.000
6.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	185.239.886	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	179.549.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Kab. Garut	> 4 Indeks	2.046.556.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	2.068.217.000
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut	110 Paket	197.383.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	207.467.000
6.01.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Garut	97 Orang	1.849.173.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	1.860.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>1.378.012.800</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>1.276.574.000</b>
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	15.446.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	8.800.000
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	439.336.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	265.681.000
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	22.794.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	9.600.000
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Garut	2 Paket	228.887.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	249.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Garut	3 Dokumen	29.305.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	12.697.000
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut	4 Laporan	261.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	272.250.000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut	4 Laporan	354.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	422.846.000
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	26.653.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	35.000.000
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>11.091.200.257</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>12.281.500.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Garut	1 Unit	164.716.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	181.500.000
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Garut	1 Unit	10.926.484.257	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	12.100.000.000
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>287.171.050</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>367.440.000</b>
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Garut	4 Laporan	10.088.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	7.260.000
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut	4 Laporan	99.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	175.450.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut	4 Laporan	30.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	30.050.000
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Garut	1 Laporan	147.337.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	154.680.000
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>110.940.000</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>117.600.000</b>
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Kab. Garut	43 Unit	110.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	117.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	Kab Garut	>4 Indeks	5.950.792.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	>4 Indeks	112.335.234.000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	Kab Garut	>4 Indeks	4.426.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	>4 Indeks	11.034.297.000
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Garut	75 laporan	1.820.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	>4 Indeks	4.410.556.000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Garut	5 Laporan	479.884.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	>4 Indeks	3.785.195.000
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja	Kab Garut	1 Laporan	6.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	>4 Indeks	27.133.000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	Kab Garut	2 laporan	66.550.000	Dana Transfer	-	>4 Indeks	301.592.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab Garut	168 laporan	1.331.410.000	Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	>4 Indeks	1.416.184.000
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan EvaluasiTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring dan EvaluasiTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab Garut	500 Dokumen	722.056.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	>4 Indeks	1.093.637.000
<b>6.01.02.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)</b>	<b>Kab Garut</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>1.524.492.400</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	<b>-</b>	<b>&gt;4 Indeks</b>	<b>1.300.937.000</b>
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab Garut	8 Laporan	1.524.492.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	>4 Indeks	1.300.937.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Kab Garut	89%	1.796.404.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	89%	1.566.773.000
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Kab Garut	89%	537.520.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	89%	363.000.000
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Kab Garut	3 Rekomendasi	537.520.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	89%	363.000.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Kab Garut	89%	1.258.884.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	89%	1.203.773.000
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	Kab Garut	75 Perangkat	109.312.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	89%	270.858.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab Garut	15 Perangkat Daerah	81.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	89%	105.693.000
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab Garut	1 Kegiatan	692..322.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	89%	442.037.000
6.01.03.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab Garut	8 Perangkat Daerah	376.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	89%	385.185.000
					<b>44.367.399.000</b>				<b>48.838.937.000</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat yang merupakan implementasi atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), yang kemudian tata cara penyusunan dan sistemika penulisiannya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan pagu dana indikatif serta sumber dananya.

Adapun Rumusan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. berikut ini:

**Tabel 4.1**

**Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2020 – 2024**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Tata Kelola dan Profesionalisme Pengawasan Intern				Indeks Penguatan Pengawasan	N/A	N/A	-	5,5	30.296.671.946	6	40.184.010.805	6,5	44.367.399.000	7	48.803.937.000	7	163.652.018.751		
	1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan			Indeks Kepuasan Pengawasan	Baik	Baik	-	Baik	10.351.724.900	Baik	11.489.267.100	Sangat Baik	12.638.191.000	Sangat Baik	13.902.007.000	Sangat baik	48.381.190.000	Inspektur	
		6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	Baik	Baik	-	Baik	9.194.412.000	Baik	10.194.412.000	Sangat Baik	11.213.851.000	Sangat Baik	12.335.234.000	Sangat Baik	42.937.909.000	Irban	
		6.01.02.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan Pengawasan Internal	N/A	N/A	-	6 Jenis	8.119.257.000	6 Jenis	9.119.257.000	6 Jenis	10.031.181.000	6 Jenis	11.034.297.000	6 Jenis	38.303.992.000	Irban	
		6.01.02.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	-	-	-	75 Laporan	3.645.088.000	75 Laporan	3.645.088.000	75 Laporan	4.009.596.000	75 Laporan	4.410.556.000	300 Laporan	15.710.328.000	Irban	Kab Garut
				2. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	-	-	-	3 Jenis		-		-		-		3 Jenis			
				3. Jumlah Laporan Hasil Reviu	-	-	-	5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		20 Jenis			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				4. Jumlah LHE	-	-	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		16 Jenis				
				5. Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	-	-	-								-				
				6. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP level terdefinisi	-	-	-								-				
		6.01.02.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	-	-	2 Jenis	2.128.261.000	5 Jenis	3.128.261.000	5 Jenis	3.441.087.000	5 Jenis	3.785.195.000	5 Jenis	12.482.804.000		Irban	Kab Garut
				Jumlah LHR	-	-	7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis				
		6.01.02.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHR	-	-	1 Laporan	22.425.000	1 Laporan	22.425.000	1 Laporan	24.667.000	1 Laporan	27.133.000	4 Laporan	96.650.000		Irban	Kab Garut
		6.01.02.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR	-	-	2 Jenis	249.250.000	2 Jenis	249.250.000	2 Jenis	274.175.000	2 Jenis	301.592.000	2 Jenis	1.074.267.000		Irban	Kab Garut
		6.01.02.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	-	-	421 LHP	1.170.400.000	421 LHP	1.170.400.000	421 LHP	1.287.440.000	421 LHP	1.416.184.000	1684 LHP	5.044.424.000		Irban	Kab Garut
		6.01.02.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Berita Acara Tindak Lanjut	-	-	499 BAT	903.833.000	500 BAT	903.833.000	500 BAT	994.216.000	500 BAT	1.093.637.000	1999 BAT	3.895.519.000		Sub Bag Perencanaan & Evlap	Kab Garut
		6.01.02.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Pengawasan Tertentu	N/A	N/A	8 Jenis	1.075.155.000	8 Jenis	1.075.155.000	8 Jenis	1.182.670.000	8 Jenis	1.300.937.000	8 Jenis	4.633.917.000		Irban Investigasi & Pengaduan	Kab Garut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.01.02.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	8 Laporan	1.075.155.000	8 Laporan	1.075.155.000	8 Laporan	1.182.670.000	8 Laporan	1.300.937.000	32 Laporan	4.633.917.000	Irban Investigasi & Pengaduan	Kab Garut
		6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	N/A	85%	-	85%	1.157.312.900	87%	1.294.855.100	89%	1.424.340.000	91%	1.566.773.000	93%	5.443.281.000	Irban	
		6.01.03.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1. Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Pengawasan	N/A	N/A	-	1 Rumusan	162.457.800	1 Rumusan	300.000.000	1 Rumusan	330.000.000	1 Rumusan	363.000.000	4 Rumusan	1.155.457.800	Sekretariat	Itda
		6.01.03.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan	-	-	-	3 Laporan	162.457.800	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	330.000.000	3 Laporan	363.000.000	12 Laporan	1.155.457.800	Sekretariat	
		6.01.03.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	N/A	N/A	-	4 Kegiatan	994.855.100	4 Kegiatan	994.855.100	4 Kegiatan	1.094.340.000	4 Kegiatan	1.203.773.000	16 Kegiatan	4.287.823.200	Irban dan Irban Investigasi & Pengaduan	Itda
		6.01.03.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan Manajemen Risiko	-	-	-	2 Laporan	223.850.000	2 Laporan	223.850.000	2 Laporan	246.235.000	2 Laporan	270.858.000	8 Laporan	964.793.000	Irban	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.01.03.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian PMPRB	-	-	-	1 Laporan	87.350.000	1 Laporan	87.350.000	1 Laporan	96.085.000	1 Laporan	105.693.000	4 Laporan	376.478.000	Irban Investigasi & Pengaduan	
		6.01.03.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Jumlah laporan pencegahan tindak pidana korupsi	-	-	-	2 Laporan	365.320.100	1 Laporan	365.320.100	1 Laporan	401.852.000	1 Laporan	442.037.000	5 Laporan	1.574.529.200	Irban Investigasi & Pengaduan	
				2. Jumlah laporan sapu bersih pungutan liar	-	-	-	2 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan		Irban Investigasi & Pengaduan	
		6.01.03.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1. Jumlah Laporan Hasil Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	-	3 Laporan	318.335.000	3 Laporan	318.335.000	3 Laporan	350.168.000	3 Laporan	385.185.000	12 Laporan	1.372.023.000	Irban Investigasi & Pengaduan	
				2. Partisipasi Survei Penilaian Integritas Pemda	-	-	-	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		4 Kali		Irban Investigasi & Pengaduan	
	<b>2. Meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)</b>			<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	-	<b>Baik</b>	<b>19.944.947.046</b>	<b>Baik</b>	<b>28.694.743.705</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>31.729.208.000</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>34.901.930.000</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>115.270.828.751</b>	<b>Inspektur</b>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Baik	Baik	-	Baik	19.944.947.046	Baik	28.694.743.705	Sangat Baik	31.729.208.000	Sangat Baik	34.901.930.000	Sangat Baik	115.270.828.751	Sekretariat	Itda
		6.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	N/A	N/A	-	15 Jenis Dokumen	116.224.000	15 Jenis Dokumen	116.224.000	15 Jenis Dokumen	127.846.000	15 Jenis Dokumen	140.630.000	15 Jenis Dokumen	500.924.000	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Itda
		6.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	-	-	-	8 Dokumen	24.974.000	8 Dokumen	24.974.000	8 Dokumen	27.471.000	8 Dokumen	30.218.000	32 Dokumen	107.637.000	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Itda
		6.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Hasil Survei	-	-	-	1 Dokumen	91.250.000	1 Dokumen	91.250.000	1 Dokumen	100.375.000	1 Dokumen	110.412.000	4 Dokumen	393.287.000	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Itda
				2. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	-	-	-	6 Dokumen	-	6 Dokumen	-	6 Dokumen	-	6 Dokumen	-	24 Dokumen	-	-	-
		6.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	N/A	N/A	-	95 Orang	15.293.776.046	97 Orang	15.293.776.046	97 Orang	16.823.153.000	97 Orang	18.505.420.000	483 Orang	65.916.125.092	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Itda
		6.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	-	-	-	95 Orang	15.281.776.046	97 Orang	15.281.776.046	97 Orang	16.809.953.000	97 Orang	18.490.900.000	386 Orang	65.864.405.092	Sub Bag Keuangan	Itda
		6.01.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	-	-	-	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	13.200.000	1 Laporan	14.520.000	4 Laporan	51.720.000	Sub Bag Keuangan	Itda



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		6.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Keamanan	N/A	N/A	-	6 Orang	148.387.909	6 Orang	148.387.909	6 Orang	163.226.000	6 Orang	179.549.000	24 Orang	639.550.818	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
		6.01.01.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan	-	-	-	6 Orang	148.387.909	6 Orang	148.387.909	6 Orang	163.226.000	6 Orang	179.549.000	24 Orang	639.550.818	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
		6.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Aspek Penunjang Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	-	2 Jenis	1.709.271.000	2 Jenis	1.709.271.000	2 Jenis	1.880.198.000	2 Jenis	2.068.217.000	2 Jenis	7.366.957.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
		6.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah Pakaian Lapangan	-	-	-	110 Buah	171.461.000	110 Buah	171.461.000	110 Buah	188.607.000	110 Buah	207.467.000	440 Buah	738.996.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
				2. Jumlah Pakaian Batik	-	-	-	240 Buah		240 Buah		240 Buah		240 Buah		960 Buah			
				3. Jumlah Pakaian Korpri	-	-	-	110 Lembar		110 Lembar		110 Lembar		110 Lembar		440 Lembar			
				4. Jumlah Pakaian Olahraga	-	-	-	110 Stel		110 Stel		110 Stel		110 Stel		440 Stel			
		6.01.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan minimal 120 Jam	-	-	-	97 Orang	1.537.810.000	97 Orang	1.537.810.000	97 Orang	1.691.591.000	97 Orang	1.860.750.000	388 Orang	6.627.961.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
				2. Jumlah Diklat/Bimtek Pengawasan yang diikuti	-	-	-	2 Jenis Diklat		2 Jenis Diklat		2 Jenis Diklat		2 Jenis Diklat		2 Jenis Diklat			
				3. Jumlah Pelatihan Kerja Sendiri (PKS) yang Dilaksanakan	-	-	-	7 Kali		7 Kali		7 Kali		7 Kali		7 Kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		6.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jasa administrasi umum perangkat daerah	N/A	N/A	-	7 Jenis	1.026.208.500	7 Jenis	1.026.208.500	7 Jenis	1.128.822.000	7 Jenis	1.241.574.000	7 Jenis	4.422.813.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
		6.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	7 Jenis	7.277.000	7 Jenis	7.277.000	7 Jenis	8.000.000	7 Jenis	8.800.000	7 Jenis	31.354.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda	
		6.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	59 Jenis	219.571.800	59 Jenis	219.571.800	59 Jenis	241.528.000	59 Jenis	265.681.000	59 Jenis	946.352.600	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda	
		6.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	-	-	7 Jenis	7.981.500	7 Jenis	7.981.500	7 Jenis	8.779.000	7 Jenis	9.600.000	7 Jenis	34.342.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda	
		6.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah Barang Cetak	-	-	7 Jenis	206.424.600	7 Jenis	206.424.600	7 Jenis	227.067.000	7 Jenis	249.700.000	7 Jenis	889.616.200	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda	
				2. Jumlah Penggandaan /FC	-	-	370.582 Lembar	370.582 Lembar	370.582 Lembar	370.582 Lembar	370.582 Lembar	370.582 Lembar	370.582 Lembar	370.582 Lembar	1.482.328 Lembar				
		6.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Bahan Bacaan/Surat Kabar	-	-	3 Jenis	10.493.600	3 Jenis	10.493.600	3 Jenis	11.542.000	3 Jenis	12.697.000	3 Jenis	45.226.200	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda	
				2. Jumlah Publikasi di Media Cetak	-	-	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	20 Kali				
		6.01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	-	-	10.600 Orang	225.000.000	10.600 Orang	225.000.000	10.600 Orang	247.500.000	10.600 Orang	272.250.000	42.400 Orang	969.750.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		6.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	-	-	300 OH	349.460.000	300 OH	349.460.000	300 OH	384.406.000	300 OH	422.846.000	1.200 OH	1.506.172.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
				2. Jumlah Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	-	-	-	200 OH		200 OH		200 OH		200 OH		800 OH			
		6.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	-	-	-	1 Jenis	150.000.000	1 Jenis	165.000.000	1 Jenis	181.500.000	1 Jenis	496.500.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	
		6.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeulair	-	-	-	-	-	1 Set	150.000.000	1 Set	165.000.000	1 Set	181.500.000	3 Set	496.500.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	
		6.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	-	4 Jenis	303.676.250	4 Jenis	303.676.250	4 Jenis	334.043.000	4 Jenis	367.440.000	4 Jenis	1.308.835.500	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Itda
		6.01.01.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat/materai	-	-	-	1200 Buah	6.000.000	1200 Buah	6.000.000	1200 Buah	6.600.000	1200 Buah	7.260.000	4.800 Buah	25.860.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
		6.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	4 Jenis	144.999.600	4 Jenis	144.999.600	4 Jenis	159.499.000	4 Jenis	175.450.000	4 Jenis	624.948.200	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
		6.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan yang Diperbaiki	-	-	-	36 Unit	24.840.000	36 Unit	24.840.000	36 Unit	27.324.000	36 Unit	30.050.000	144 Unit	107.054.000	Sub Bag Umum & Kepegawaian	Itda
		6.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Tenaga Kebersihan	-	-	-	3 Orang	127.836.650	3 Orang	127.836.650	3 Orang	140.620.000	3 Orang	154.680.000	12 Orang	550.973.300	Sub Bag Umum & Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2019) Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
																		aian	
				2. Jumlah Alat Kebersihan	-	-	-	6 Per Ruang		6 Per Ruang		6 Per Ruang		6 Per Ruang		24 Per Ruang			
		6.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	N/A	N/A	-	3 Jenis	1.347.403.341	3 Jenis	9.947.200.000	3 Jenis	11.106.920.000	3 Jenis	12.217.600.000	3 Jenis	34.619.123.341	Sub Bag Perencanaan & Evlap	Itda
		6.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah Surat Izin Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	38 Unit	97.200.000	43 Unit	97.200.000	43 Unit	106.920.000	43 Unit	117.600.000	167 Unit	418.920.000	Sub Bag Umum & Kepegawain	Itda
				2. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dilakukan pemeliharaan	-	-	-	5 Unit		24 Unit		24 Unit		24 Unit		77 Unit			
				3. Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dilakukan pemeliharaan	-	-	-	9 Unit		19 Unit		19 Unit		19 Unit		66 Unit			
		6.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	-	-	-	1 Gedung	1.250.203.341	1 Gedung	9.850.000.000	1 Gedung	11.000.000.000	1 Gedung	12.100.000.000	1 Gedung	34.200.203.341	Sub Bag Umum & Kepegawain	Itda
							-		30.296.671.946		40.184.010.805		44.367.399.000		48.803.937.000		163.652.018.751		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana kerja (Renja) Inspektorat Tahun Anggaran 2023 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran, guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan tetap memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut maupun dari APBD Provinsi Jawa Barat.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut tahun 2023 diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut pada Tahun 2023 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Garut sehingga dapat lebih akuntabel dan transparan kepada seluruh stakeholders pemerintah Kabupaten Garut dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Inspektorat. Diharapkan semua elemen kelembagaan Inspektorat dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sebagai input bagi para pemangku kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran pemerintah daerah bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah, masing-masing pemerintah daerah agar mengalokasikan minimal 0,5 % dari APBD dan meningkat setiap tahunnya secara proporsional untuk anggaran Inspektorat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Hal ini sejalan dengan surat keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 700-462 Tahun 2007, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ tanggal 23 September 2008, surat Inspektur

Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/435/A.2/IJ tanggal 07 April 2017 dan surat Direktut Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor 700/503/A1/SJ tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Garut mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/audit atas instansi pemerintahan dan aparatur Pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang di terima akan di prioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**